

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sistem kekuasaan yang diterapkan di Indonesia sebelum adanya pengaruh dari budaya luar masih terikat dengan adat istiadat yang berlaku yang dipimpin oleh ketua kampung. Kedudukan ketua kampung sangat dihormati dan segala perintah serta larangannya akan ditaati oleh masyarakat yang dipimpinnya. Sesuai dengan letak geografis kepulauan Indonesia yang diapit oleh dua samudera dan dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta didukung oleh kesuburan tanahnya yang banyak menghasilkan hasil bumi secara melimpah, maka mulailah bangsa asing datang ke Indonesia. Mereka semula hanya ingin berdagang dengan bangsa kita. Tetapi lama-kelamaan terjadilah hubungan yang lebih akrab, tidak saja dalam perdagangan. Sehingga pengaruh-pengaruh budaya mereka mulai pula mempengaruhi sistem kebudayaan bangsa kita. Salah satunya adalah keberadaan kepala kampung sudah diganti oleh seorang Raja . Dan sebuah perkampungan berubah menjadi kerajaan.

Sistem pemerintahan yang dipakai untuk mengatur roda pemerintahan pada waktu itu adalah sistem pemerintahan kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja. Sistem pemerintahan yang pernah berlangsung di Indonesia adalah sistem pemerintahan kerajaan yang bercorak Hindu-Budha dan sistem pemerintahan kerajaan yang bercorak islam. Pada sistem pemerintahan kerajaan, berdasarkan

perkembangan politik dan perluasan wilayah ada perbedaan beberapa hal seperti nama, sebutan pejabat, pegawai pemerintahan dan sebagainya.

Ketika Belanda mulai masuk dan menduduki bumi Indonesia, pembentukan pemerintahan daerah di Indonesia tidak terlepas dari pratek politik penjajahan Belanda yang ingin menguasai secara keseluruhan bangsa Indonesia. Dalam menanamkan kekuasaannya Belanda menggunakan berbagai macam cara, salah satu diantaranya adalah membagi tanah Indonesia atas beberapa daerah dengan alasan untuk menguasai wilayah Hindia Belanda yang tujuannya adalah menghancurkan wilayah Republik Indonesia.

Dalam sistem kolonial ini, pihak penjajah berperan sebagai pihak yang menguasai dan menjajah, sementara pihak pribumi harus tunduk atas segala peraturan yang diterapkan oleh pihak kolonial. Dalam prateknya mengakibatkan kerugian di satu pihak (pribumi) dan keuntungan di pihak lain (penjajah).

Abad ke-19 dan awal abad ke-20, Indonesia sudah berada pada penguasaan bangsa Belanda. Oleh karena itu sistem pemerintahan yang diterapkannya pun adalah sistem pemerintahan kolonial Hindia-Belanda. Kekuasaan tertinggi saat itu dipegang dan diatur oleh pemerintahan kerajaan Belanda. Belanda sering melakukan intervensi terhadap persoalan-persoalan intern kerajaan. Misalnya, dalam masalah pergantian tahta kerajaan. Akibatnya, kerajaan-kerajaan yang bersangkutan akan dikendalikan oleh Belanda. Oleh karena kekuasaan kolonial semakin menguat, kekuasaan Raja semakin merosot. Raja dan para pejabat lainnya semakin bergantung kepada kekuasaan asing. Kekuasaan dan pemerintahan kerajaan telah ditempatkan di bawah kekuasaan

kolonial. Perubahan-perubahan itu menunjukkan bahwa kedaulatan dan kekuasaan politik kaum pribumi sudah tidak begitu berarti. Praktik kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa Belanda atas wilayah Indonesia mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan dalam aspek-aspek kehidupan masyarakat. Pada dasarnya perubahan itu terjadi pada aspek kehidupan politik, sosial ekonomi, pendidikan dan aspek kebudayaan.

Pemerintahan raja-raja Pakpak di Sumbul Pegagan telah ada jauh sebelum kedatangan penjajahan Belanda. Walaupun saat itu belum dikenal sebutan Wilayah/Daerah Otonomi, tetapi kehadiran sebuah pemerintahan pada zaman tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pengakuan terhadap raja-raja Adat. Ketika Belanda mulai masuk dan menduduki Sumbul Pegagan, Belanda merubah struktur kekuasaan di Sumbul Pegagan. Perubahan nilai nilai, pola dan struktur sistem kekuasaan ini terjadi secara cepat dengan mengacu pada sistem dan pembagian wilayah kerajaan Belanda, sehingga daerah Sumbul ini juga ikut ditetapkan sebagai Onder Afdeling. Dalam sistem kolonial ini, pihak penjajah berperan sebagai pihak yang menguasai dan menjajah, sementara pihak pribumi harus tunduk atas segala peraturan yang diterapkan pihak kolonial.

Beberapa hal tersebut lah yang menjadi faktor pendorong peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang **“Pengaruh Pemerintahan Belanda Terhadap Perubahan Sistem Kekuasaan Raja-raja Pakpak Di Sumbul Pegagan (1902-1942)”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian berikut:

1. Sistem pemerintahan tradisional sebelum kedatangan Belanda di Sumbul Pegagan
2. Pelaksanaan fungsi pemerintahan tradisional raja-raja Pakpak di Sumbul Pegagan akibat adanya pengaruh dari pemerintahan Belanda
3. Pemerintah Belanda menjalankan sistem kekuasaannya di Sumbul Pegagan
4. Tujuan Belanda tetap mengakui hukum adat dalam struktur pemerintahan yang dibentuk

## **C. Pembatasan Masalah**

Mengingat luasnya cakupan masalah yang timbul serta keterbatasan waktu, dana, dan tenaga yang tersedia, maka agar penelitian ini terarah pada tujuannya, dibuat pembatasan masalah untuk memudahkan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Dalam hal ini peneliti membatasi penelitiannya yaitu untuk mengetahui: **“Pengaruh Pemerintahan Belanda Terhadap Perubahan Sistem Kekuasaan Raja-raja Pakpak Di Sumbul Pegagan ( 1902-1942)”**

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pemerintahan raja-raja Pakpak sebelum kedatangan Belanda di Sumbul Pegagan?
2. Bagaimana pelaksanaan fungsi pemerintahan raja-raja Pakpak akibat adanya pengaruh dari pemerintahan Belanda?
3. Bagaimana Pemerintah Belanda menjalankan sistem kekuasaannya di Sumbul Pegagan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pemerintahan raja-raja Pakpak sebelum kedatangan Belanda di Sumbul Pegagan
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi pemerintahan raja-raja Pakpak akibat adanya pengaruh dari pemerintahan Belanda
3. Untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Belanda menjalankan sistem kekuasaannya di Sumbul Pegagan

## **F. Manfaat**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan peneliti dan pembaca tentang bagaimana perubahan sistem kekuasaan Raja-raja Pakpak pada masa pemerintahan Belanda
2. Sebagai perbandingan bagi mahasiswa pendidikan sejarah maupun bagi jurusan lainnya dengan bidang penelitian yang sama pada lokasi penelitian yang berbeda untuk menghasilkan keputusan yang sempurna
3. Dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah setempat dalam mengembangkan pengetahuan sejarah lokal khususnya di wilayah Sumbul Pegagan agar lebih dikenal luas